

ABSTRAKSI

Masalah yang dihadapi Propinsi Jawa Tengah saat ini terkait dengan tingginya angka kemiskinan dan kinerja pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih rendah. Padahal misi utama dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Di antara kebutuhan yang paling mendasar dan berpengaruh besar terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran publik di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pengurangan kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah melalui penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menganalisis pengaruh kinerja pelayanan publik sebagai variabel intervening digunakan analisis jalur (*path analysis*) dan uji Sobel.

Hasil penelitian menemukan bahwa kinerja pelayanan publik tidak berperan sebagai variabel intervening, dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor publik dengan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pengeluaran pemerintah sektor publik tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja pelayanan publik. Tetapi pengeluaran pemerintah sektor publik bersama-sama dengan kinerja pelayanan publik secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam upaya mengurangi kemiskinan, pemerintah daerah perlu melakukan pentargetan capaian kinerja pelayanan publik atas pengeluaran yang dialokasikan dalam anggaran pemerintah (APBD) terutama atas pengeluaran dalam rangka penyediaan kapasitas dasar bidang pendidikan maupun kesehatan terutama bagi masyarakat miskin.

Kata kunci: Indeks Kinerja Pelayanan Publik, Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan, dan Persentase Penduduk Miskin.